

## **ABSTRACT**

*Responsiveness is the ability of an organization or institution to identify community needs and provide appropriate services. One form of responsiveness that is needed is the protection of children from acts of violence. Cases of violence against children in Lhokseumawe City have continued to increase from 2021 to 2025, requiring serious attention from the local government. This study aims to determine the responsiveness of the Lhokseumawe City Government in addressing cases of violence against children. This study employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning (DP3AP2KB) of Lhokseumawe City and other related parties. The results indicate that the responsiveness of the Lhokseumawe City Government in handling cases of violence against children can be categorized as fairly responsive. This is reflected in the provision of complaint reporting services, victim assistance, psychological and legal support services, as well as coordination with related institutions. In addition, the Regional House of Representatives (DPRK) of Lhokseumawe City supports these efforts through its legislative, budgeting, and supervisory functions.*

**Keywords:** *Responsiveness, Local Government, Child Violence.*

## ABSTRAK

Responsivitas merupakan kemampuan suatu organisasi atau instansi dalam mengenali kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan yang sesuai. Salah satu bentuk responsivitas yang diperlukan adalah perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan. Kasus kekerasan terhadap anak di Kota Lhokseumawe masih mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2025 sehingga memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui responsivitas Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Lhokseumawe serta pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responsivitas Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak tergolong cukup responsif. Hal ini terlihat dari adanya penerimaan laporan, pendampingan korban, penyediaan layanan psikologis dan bantuan hukum, serta koordinasi dengan lembaga terkait. Selain itu, DPRK Kota Lhokseumawe turut mendukung melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

**Kata Kunci:** Responsivitas, Pemerintah Daerah, Kekerasan Anak